



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10696-10703

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pelaksanaan Administrasi Bidang Kepesertaan Dalam Pengelolaan Data Jaminan Konstruksi (JAKON) Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda

Felicia Aurelia Putri Indra<sup>1</sup>, R. Yuniardi Rusdianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran Jawa Timur

<sup>1</sup>[23042010231@student.upnjatim.ac.id](mailto:23042010231@student.upnjatim.ac.id), <sup>2</sup>[rusdivanto.adbis@upnjatim.ac.id](mailto:rusdivanto.adbis@upnjatim.ac.id)

### **Abstrak**

*Administrasi kepesertaan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pada sektor jasa konstruksi yang memiliki karakteristik tenaga kerja bersifat sementara, berbasis proyek, serta memiliki tingkat mobilitas dan risiko kerja yang tinggi. Pengelolaan data kepesertaan yang tertib, akurat, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diberikan secara optimal kepada tenaga kerja konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi dalam pengelolaan data melalui sistem E-Jakon di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, serta mengkaji peran sistem tersebut dalam mendukung ketertiban administrasi dan kualitas pelayanan kepesertaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Jakon berperan dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi kepesertaan, mempermudah pencatatan dan pembaruan data tenaga kerja konstruksi, serta mendukung ketertiban dan konsistensi data kepesertaan. Sistem E-Jakon juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi, sehingga mendukung kelancaran pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan tingginya mobilitas tenaga kerja, kelengkapan dan ketepatan data yang disampaikan oleh perusahaan jasa konstruksi, serta perlunya ketelitian tinggi dalam proses input dan verifikasi data. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sistem E-Jakon, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dengan perusahaan jasa konstruksi menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas administrasi kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi.*

**Kata kunci:** Administrasi Kepesertaan, Jasa Konstruksi, E-Jakon, BPJS Ketenagakerjaan

### **1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Agar pelayanan jaminan sosial dapat berjalan secara optimal, diperlukan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan mampu mendukung kelancaran proses pelayanan kepada peserta. Administrasi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti ketidakteraturan data kepesertaan dan hambatan dalam pelayanan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan (Ain & Lubis, 2023).

Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, administrasi kepesertaan memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial. Administrasi kepesertaan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan data peserta, tetapi juga mencakup pengelolaan dokumen, pembaruan data, serta penyimpanan arsip yang mendukung akuntabilitas lembaga. Farizi dan Warganegara (2022) menegaskan bahwa pengelolaan arsip kepesertaan yang tertib dan sistematis menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan administrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Sektor jasa konstruksi memiliki karakteristik khusus, seperti sistem kerja berbasis proyek dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan administrasi kepesertaan yang lebih adaptif dan terstruktur agar data tenaga kerja tetap akurat dan mutakhir. Marpaung dan Respati (2024) menyatakan bahwa efektivitas administrasi keikutsertaan jasa konstruksi sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan dan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sistem E-Jakon sebagai sarana pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi berbasis digital. Sistem ini diharapkan mampu mendukung ketertiban data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepesertaan. Namun demikian, penerapan sistem digital dalam administrasi kepesertaan tetap memerlukan pengendalian operasional yang baik agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tujuan pelayanan. Simatupang dan Nirawati (2024) menekankan bahwa pengendalian operasional administrasi kepesertaan menjadi kunci dalam memastikan sistem administrasi berjalan secara efektif.

Selain aspek sistem dan administrasi, kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Strategi peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan peserta. Siburian (2025) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan kepesertaan memerlukan sinergi antara sistem administrasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta prosedur pelayanan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi melalui sistem E-Jakon di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran sistem E-Jakon dalam mendukung ketertiban administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepesertaan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi melalui sistem E-Jakon di BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami proses administrasi, pemanfaatan sistem digital, serta praktik pelayanan kepesertaan dalam konteks nyata tanpa melakukan pengujian hipotesis secara kuantitatif. Pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena administrasi publik dan pelayanan jaminan sosial yang menekankan pada proses kerja dan kualitas layanan (Tambunan, 2020).

Objek penelitian ini adalah pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya melalui pemanfaatan sistem E-Jakon. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pencatatan data kepesertaan, pembaruan data tenaga kerja konstruksi, serta pengelolaan dokumen administrasi yang mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada peran penting sektor jasa konstruksi dalam ketenagakerjaan serta kebutuhan akan sistem administrasi yang tertib dan terintegrasi sebagaimana diatur dalam kebijakan resmi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses administrasi kepesertaan jasa konstruksi, terutama pada penggunaan sistem E-Jakon dalam pengelolaan data kepesertaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan sistem digital dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Digitalisasi administrasi dinilai sebagai salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Kurniawan, 2023).

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung berupa arsip administrasi kepesertaan, data kepesertaan jasa konstruksi, serta informasi resmi terkait prosedur dan kebijakan kepesertaan. Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan memberikan bukti administratif mengenai pelaksanaan sistem E-Jakon dalam praktik. Pemanfaatan dokumen administratif menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dan keteraturan administrasi publik berbasis digital (Agustina et al., 2025).

Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah dan artikel yang membahas digitalisasi administrasi publik, e-government, serta pelayanan publik berbasis sistem informasi. Studi pustaka bertujuan untuk membangun landasan teoritis penelitian serta membantu peneliti dalam menganalisis temuan lapangan secara konseptual. Digital governance dan e-government dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (Balansa et al., 2025; Siregar, 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mendeskripsikan proses pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi serta mengaitkannya dengan konsep transformasi digital dan pelayanan publik. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem E-Jakon berkontribusi dalam mendukung efisiensi, ketertiban data, dan kualitas pelayanan kepesertaan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### **Pengelolaan Administrasi Kepesertaan Jasa Konstruksi melalui Sistem E-Jakon**

Pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem E-Jakon sebagai sarana utama dalam mendukung pengelolaan data kepesertaan berbasis proyek. Sistem E-Jakon digunakan untuk mencatat data proyek, data perusahaan jasa konstruksi, serta data tenaga kerja yang terlibat dalam suatu kegiatan konstruksi. Pemanfaatan sistem ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan administrasi serta memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek telah terdaftar dan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan administrasi melalui sistem E-Jakon diawali dengan penerimaan data dari perusahaan jasa konstruksi yang meliputi informasi proyek dan tenaga kerja. Data tersebut kemudian diverifikasi sebelum diinput ke dalam sistem untuk memastikan kesesuaian antara identitas tenaga kerja, masa kerja, serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Proses verifikasi dan input data menjadi tahapan penting karena keakuratan data kepesertaan akan menentukan validitas perlindungan jaminan sosial yang diberikan. Hal ini sejalan dengan temuan Marpaung dan Respati (2024) yang menyatakan bahwa administrasi kepesertaan jasa konstruksi menuntut ketelitian tinggi karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban tenaga kerja.

Selain proses pencatatan data, sistem E-Jakon juga digunakan dalam pengelolaan dokumen administrasi kepesertaan. Dokumen yang dihasilkan melalui sistem ini berfungsi sebagai bukti administratif bahwa tenaga kerja konstruksi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Digitalisasi administrasi kepesertaan melalui E-Jakon membantu mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual serta mempermudah proses penelusuran data apabila diperlukan. Farizi dan Warganegara (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan administrasi berbasis sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan ketertiban arsip kepesertaan.

Penggunaan sistem E-Jakon juga mendukung integrasi data kepesertaan jasa konstruksi dengan sistem administrasi BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan. Data yang tersimpan secara terpusat memudahkan petugas dalam melakukan pembaruan data apabila terjadi perubahan jumlah tenaga kerja selama proyek berlangsung. Kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik sektor jasa konstruksi yang memiliki tingkat mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Ain dan Lubis (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi yang tertata dan terintegrasi akan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi melalui sistem E-Jakon di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dapat dinilai telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Sistem ini membantu meningkatkan ketertiban data, mendukung efisiensi proses administrasi, serta menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi.

#### **Efektivitas Sistem E-Jakon dalam Mendukung Ketertiban Data Kepesertaan**

Efektivitas sistem E-Jakon dalam mendukung ketertiban data kepesertaan jasa konstruksi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola data tenaga kerja secara terpusat dan terintegrasi. Seluruh data kepesertaan yang diinput ke dalam sistem tersimpan dalam basis data yang sama, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pencarian, pembaruan, serta pencetakan dokumen kepesertaan. Kondisi ini membantu menciptakan keteraturan administrasi dan mengurangi risiko terjadinya duplikasi maupun ketidaksesuaian data kepesertaan.

Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan sistem E-Jakon mempercepat proses pelayanan administrasi kepesertaan jasa konstruksi. Proses yang sebelumnya memerlukan pencatatan manual dan pemeriksaan berulang kini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui sistem digital. Efisiensi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja petugas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. Ain dan Lubis (2023) menyatakan bahwa ketertiban administrasi dan keakuratan data kepesertaan merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain meningkatkan efisiensi, sistem E-Jakon juga berperan dalam menjaga konsistensi dan akurasi data kepesertaan. Format input data yang telah ditentukan dalam sistem membantu petugas dalam memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Dengan adanya standar input tersebut, potensi kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Simatupang dan Nirawati (2024)

menegaskan bahwa sistem informasi administrasi yang terstruktur berkontribusi dalam meningkatkan pengendalian operasional dan ketertiban data kepesertaan jasa konstruksi.

Efektivitas sistem E-Jakon juga terlihat dari kemampuannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi kepesertaan. Data yang tersimpan secara sistematis memudahkan proses pengawasan dan evaluasi internal, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kepesertaan jasa konstruksi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Marpaung dan Respati (2024) yang menyatakan bahwa administrasi kepesertaan yang tertib dan transparan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan demikian, sistem E-Jakon dapat dinilai efektif dalam mendukung ketertiban data kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda. Meskipun demikian, efektivitas tersebut tetap memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang teliti dan disiplin dalam menjalankan prosedur administrasi agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal

### **Tantangan Administrasi Data Pada Sektor Jasa Konstruksi**

Administrasi kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun telah didukung oleh sistem E-Jakon. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik sektor jasa konstruksi yang memiliki tingkat mobilitas tenaga kerja yang tinggi dan masa kerja yang relatif singkat. Kondisi ini menyebabkan perubahan data kepesertaan terjadi secara cepat, sehingga menuntut pembaruan data yang dilakukan secara berkala agar kepesertaan tetap sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan data yang disampaikan oleh perusahaan jasa konstruksi. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan administrasi dapat menghambat proses verifikasi dan input data ke dalam sistem E-Jakon. Hal ini berpotensi menunda proses administrasi kepesertaan dan memengaruhi kelancaran pelayanan. Siburian (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan peserta dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban administrasi kepesertaan.

Selain itu, pengelolaan dokumen dan arsip administrasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam administrasi kepesertaan jasa konstruksi. Dokumen E-Jakon yang telah dicetak dan dipindai perlu dikelola secara sistematis agar mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan. Pengelolaan arsip yang kurang tertib dapat menghambat proses pelayanan dan evaluasi administrasi. Farizi dan Warganegara (2022) menyatakan bahwa pengelolaan arsip administrasi kepesertaan yang tidak terstruktur dapat berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan dan akuntabilitas lembaga.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan pemahaman sebagian pihak terkait prosedur administrasi kepesertaan jasa konstruksi. Kurangnya pemahaman terhadap alur dan ketentuan administrasi dapat menyebabkan kesalahan pengisian data atau keterlambatan dalam pembaruan data kepesertaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan jasa konstruksi agar proses administrasi dapat berjalan dengan baik. Ain dan Lubis (2023) menekankan bahwa kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kerja sama dan pemahaman seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, meskipun sistem E-Jakon telah mendukung pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi secara lebih efektif, berbagai tantangan tersebut perlu mendapatkan perhatian. Upaya peningkatan kualitas data, pengelolaan arsip yang lebih tertib, serta penguatan koordinasi dengan perusahaan jasa konstruksi menjadi langkah penting agar sistem E-Jakon dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perlindungan jaminan sosial tenaga kerja konstruksi.

### **Implikasi Penerapan Sistem E-Jakon terhadap Kinerja Administrasi Kepesertaan**

Penerapan sistem E-Jakon dalam pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi memberikan implikasi yang nyata terhadap peningkatan kinerja administrasi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda. Sistem ini tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan data, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian administrasi yang membantu menciptakan keteraturan kerja dan konsistensi prosedur pelayanan. Dengan adanya sistem E-Jakon, proses administrasi kepesertaan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi secara sistematis.

Implikasi positif lainnya terlihat dari meningkatnya efisiensi waktu dalam proses administrasi kepesertaan. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama karena dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan lebih cepat melalui sistem digital. Efisiensi waktu ini berdampak langsung pada kelancaran pelayanan

administrasi dan mengurangi potensi penumpukan pekerjaan administratif, terutama pada saat terjadi peningkatan jumlah proyek konstruksi.

Selain efisiensi, sistem E-Jakon juga berimplikasi pada peningkatan kualitas data kepesertaan. Data yang tersimpan secara terpusat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi administrasi kepesertaan. Petugas dapat dengan mudah mengidentifikasi data yang perlu diperbarui serta memastikan bahwa data kepesertaan selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem E-Jakon tidak hanya meningkatkan kinerja administrasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### **Peran Sumber Daya Manusia dalam Keberhasilan Administrasi Kepesertaan**

Meskipun sistem E-Jakon telah menyediakan sarana digital dalam pengelolaan administrasi kepesertaan, keberhasilan implementasi sistem tersebut sangat bergantung pada peran sumber daya manusia. Petugas administrasi memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa setiap tahapan administrasi, mulai dari verifikasi hingga input data, dilakukan secara teliti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesalahan manusia dalam proses administrasi dapat berdampak pada keakuratan data dan keabsahan perlindungan jaminan sosial.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan sistem E-Jakon secara optimal. Petugas yang memiliki pemahaman yang baik terhadap alur administrasi dan sistem informasi cenderung mampu meminimalkan kesalahan administratif. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap sistem dapat menyebabkan terjadinya kesalahan input data atau keterlambatan pembaruan data kepesertaan.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan yang penting. Pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan sistem E-Jakon, tetapi juga pada pemahaman prosedur administrasi kepesertaan jasa konstruksi secara menyeluruh. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, sistem E-Jakon dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung efektivitas administrasi kepesertaan.

### **Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan Jasa Konstruksi**

Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan jasa konstruksi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi. Karakteristik sektor konstruksi yang bersifat dinamis, berbasis proyek, serta memiliki tingkat mobilitas tenaga kerja yang tinggi menuntut adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar data kepesertaan dapat dikelola secara akurat dan mutakhir. Tanpa koordinasi yang baik, proses administrasi kepesertaan berpotensi mengalami kendala, seperti keterlambatan pembaruan data atau ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi aktual di lapangan.

Dalam praktiknya, koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan jasa konstruksi diawali sejak tahap pendaftaran proyek. Perusahaan jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi proyek dan data tenaga kerja secara lengkap dan tepat waktu. Data tersebut menjadi dasar bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam menetapkan kepesertaan jasa konstruksi serta memastikan bahwa seluruh tenaga kerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ketepatan informasi yang disampaikan oleh perusahaan sangat menentukan kelancaran proses administrasi kepesertaan.

Koordinasi juga diperlukan selama pelaksanaan proyek konstruksi, terutama ketika terjadi perubahan jumlah tenaga kerja, masa kerja, atau lingkup pekerjaan. Perubahan tersebut harus segera diinformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar pembaruan data kepesertaan dapat dilakukan melalui sistem E-Jakon. Apabila perusahaan jasa konstruksi tidak segera menyampaikan perubahan data, maka data kepesertaan yang tercatat berpotensi tidak mencerminkan kondisi aktual. Hal ini dapat berdampak pada ketidakakuratan data dan berisiko menghambat perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi.

Selain itu, koordinasi yang baik juga mendukung terciptanya kesamaan pemahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan jasa konstruksi terkait prosedur administrasi kepesertaan. Perbedaan pemahaman mengenai alur administrasi dan ketentuan kepesertaan dapat menyebabkan kesalahan pengisian data atau keterlambatan penyampaian dokumen. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala kepada perusahaan jasa konstruksi agar proses administrasi kepesertaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi antara kedua pihak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap kewajiban administrasi kepesertaan. Perusahaan yang memiliki komunikasi yang baik dengan BPJS Ketenagakerjaan cenderung lebih kooperatif dalam menyampaikan data dan mengikuti prosedur administrasi.

Kondisi ini mendukung terciptanya ketertiban administrasi kepesertaan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi.

Dengan demikian, koordinasi yang efektif antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan jasa konstruksi tidak hanya berfungsi untuk memperlancar proses administrasi kepesertaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja konstruksi. Koordinasi yang berkelanjutan, didukung oleh komunikasi yang jelas dan pemanfaatan sistem E-Jakon secara optimal, akan membantu menciptakan administrasi kepesertaan yang tertib, akurat, dan berkelanjutan.

#### **Administrasi Kepesertaan sebagai Instrumen Perlindungan Sosial**

Administrasi kepesertaan memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan sosial bagi tenaga kerja, khususnya pada sektor jasa konstruksi yang memiliki tingkat risiko kerja relatif tinggi. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat diberikan secara optimal tanpa adanya administrasi kepesertaan yang tertib, akurat, dan terkelola dengan baik. Data kepesertaan menjadi dasar utama dalam penetapan status peserta serta pemberian manfaat jaminan sosial ketika tenaga kerja menghadapi risiko kerja.

Pada sektor jasa konstruksi, administrasi kepesertaan memiliki kompleksitas tersendiri karena sifat pekerjaan yang berbasis proyek dan masa kerja yang relatif singkat. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem administrasi yang mampu mencatat dan memperbarui data tenaga kerja secara dinamis. Apabila administrasi kepesertaan tidak dikelola secara optimal, tenaga kerja berpotensi tidak terdaftar secara sah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga hak perlindungan sosialnya tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Penerapan sistem E-Jakon dalam pengelolaan administrasi kepesertaan membantu memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam suatu proyek tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data kepesertaan dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesalahan administratif. Dengan data kepesertaan yang valid dan mutakhir, tenaga kerja memiliki kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau risiko lainnya yang berkaitan dengan aktivitas konstruksi.

Administrasi kepesertaan juga berperan sebagai instrumen keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui administrasi yang tertib, seluruh tenaga kerja konstruksi memperoleh perlindungan yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kepesertaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berkontribusi terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Selain itu, administrasi kepesertaan yang baik mendukung akuntabilitas lembaga dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data kepesertaan yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam pemberian manfaat jaminan sosial. Kondisi ini penting untuk menjaga kepercayaan tenaga kerja dan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial.

Dengan demikian, administrasi kepesertaan dapat dipandang sebagai fondasi utama dalam sistem perlindungan sosial tenaga kerja konstruksi. Optimalisasi pengelolaan administrasi kepesertaan melalui sistem E-Jakon, didukung oleh ketelitian petugas dan kerja sama dengan perusahaan jasa konstruksi, menjadi langkah strategis dalam memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diberikan secara adil, tepat, dan berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui penerapan sistem E-Jakon sebagai sistem administrasi berbasis digital. Sistem ini menjadi sarana utama dalam mendukung pencatatan, pembaruan, dan pengelolaan data kepesertaan tenaga kerja konstruksi yang bersifat berbasis proyek dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Penerapan sistem E-Jakon memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ketertiban administrasi kepesertaan yang menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Jakon berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi kepesertaan jasa konstruksi. Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu relatif lama kini dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem digital. Data kepesertaan yang tersimpan secara terpusat memudahkan petugas dalam melakukan pencarian, pembaruan, serta pencetakan dokumen kepesertaan. Kondisi ini mendukung

kelancaran pelayanan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, pengelolaan administrasi kepesertaan melalui sistem E-Jakon juga berkontribusi dalam menjaga akurasi dan konsistensi data kepesertaan jasa konstruksi. Standarisasi input data dalam sistem membantu meminimalkan kesalahan pencatatan dan mengurangi potensi ketidaksesuaian data. Ketertiban dan keakuratan data kepesertaan menjadi aspek penting karena data tersebut berfungsi sebagai dasar dalam pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi. Lebih lanjut, administrasi kepesertaan dalam konteks jasa konstruksi dapat dipahami tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Data kepesertaan yang tertib dan akurat memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi memperoleh hak perlindungan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan administrasi kepesertaan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang bekerja pada sektor dengan risiko kerja yang relatif tinggi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya sejumlah tantangan dalam pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi. Tantangan tersebut meliputi tingginya mobilitas tenaga kerja, perubahan data kepesertaan yang terjadi secara cepat, kelengkapan dan ketepatan data yang disampaikan oleh perusahaan jasa konstruksi, serta pengelolaan dokumen dan arsip administrasi yang memerlukan ketelitian dan keterampilan tinggi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan administrasi kepesertaan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem digital, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran sumber daya manusia dan tingkat koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi memerlukan upaya optimalisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya petugas administrasi, menjadi hal yang penting agar sistem E-Jakon dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, penguatan koordinasi dan komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan jasa konstruksi perlu terus ditingkatkan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, dan pembaruan data kepesertaan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan dukungan sistem E-Jakon yang dioptimalkan, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi yang baik dengan perusahaan jasa konstruksi, pengelolaan administrasi kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat semakin mendukung ketertiban administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta efektivitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, pengelolaan administrasi kepesertaan yang tertib dan terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan sosial tenaga kerja konstruksi yang adil, tepat, dan berkelanjutan.

## Referensi

1. Ain, I. N., & Lubis, F. A. (2023). Analisis kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan model SERVQUAL. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/19114>
2. Farizi, D. D., & Warganegara, L. A. (2022). Analisis pengelolaan arsip kepesertaan inaktif di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. *Jurnal Moneter*, 9(1). <https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/1674>
3. Marpaung, C. F., & Respati, I. (2024). Efektivitas administrasi keikutsertaan jasa konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2). <https://mand-ycomm.org/index.php/eabmij/article/view/781>
4. Simatupang, M. P. A., & Nirawati, L. (2024). Pengendalian operasional administrasi kepesertaan jasa konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan. *Economic and Business Management Journal*. <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/227>
5. Siburian, R. E. H. (2025). Strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kepesertaan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1520>
6. Tambunan, R. (2020). Upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam sosialisasi program jaminan hari tua kepada pekerja informal. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://pdfs.semanticscholar.org/574b/3a15e429f2a31b80f16c55ba45b6a22a0175.pdf>
7. BPJS Ketenagakerjaan. (2023). Program dan kepesertaan jasa konstruksi. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program-jasa-konstruksi.html>
8. Balansa, S. W., Posumah, J. H., & Mambo, R. (2025). Pengaruh Digital Governance terhadap kualitas pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3). <https://doi.org/10.35797/jap.v10i3.59506>
9. Unnes (2025). Indonesia's Digital Transformation: How E-Government is Transforming Public Services. *Journal Unnes (e-journal)*, 2025. <https://journal.unnes.ac.id/journals/indi/article/view/23037>
10. Agustina, R., Januarb, N. V., Maharani, D. A., Septiyenad, E., & Saputraf, B. (2025). Digitalisasi Administrasi Publik: Peluang, Tantangan, dan Model Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/3110>
11. Yungkul, Y. (2025). Optimalisasi Sistem Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan di Era

- Digital. Jurnal Pendidikan Indonesia. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8431>
12. Kurniawan, M. (2023). Digital Services of Public Government Administration. Jurnal SASI (open access). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1693>
  13. Maulidini, J. (2025). Digitalisasi Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efisiensi Sistem Pelayanan Publik. J-Innovative Journal. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17780>
  14. Siregar, A. R. (2025). The Influence of E-Government on Public Service Quality. International Journal of E-Government & Public Affairs. <https://ijerfa.afidifaljournal.com/index.php/ijerfa/article/view/295>
  15. Natika, L. (2025). Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Jurnal Publik. <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/2040>